

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menjelaskan berdasarkan teori yang digunakan tentang kepemimpinan demokratis yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai yang menjelaskan konsep kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang mampu menggerakkan bawahannya secara efektif dan juga efisien. Seorang pemimpin dapat memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin akan berperan sebagai koordinator dari seluruh berbagai unsur serta komponen-komponen organisasi sehingga dapat bergerak sesuai sebagaimana mestinya. Selain itu, kepemimpinan yang demokratis seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsi dari kepemimpinannya akan menggunakan pendekatan holistik dan pendekatan integralistik. Artinya adalah dalam upaya pengambilan suatu kebijakan dan keputusan seorang pemimpin harus memperhatikan dan memperhitungkan semua faktor-faktor yang ada secara keseluruhan, yang nantinya semua faktor-faktor ini akan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya yang tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan bersama.

Pemimpin yang memiliki tipe gaya kepemimpinan demokratis akan selalu memperlakukan rakyat dan masyarakat ataupun bawahannya dengan cara yang manusia. Dengan demikian, para bawahan akan selalu dilibatkan secara langsung artinya adalah para bawahan akan sadar terhadap tugas serta kewajiban yang dimilikinya. Dengan terlibatnya para bawahan, bawahan akan lebih merasa dihargai dan diperlakukan dengan

cara yang manusiawi. Berkesinambungan dengan diperlakukannya dengan cara yang manusiawi, jika terdapat bawahan yang melanggar etika kerja yang telah disepakati sebelumnya dalam menindaklanjutinya seorang pemimpin akan menggunakan pendekatan yang korektif serta edukatif. Untuk lebih detailnya terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis penulis akan menjabarkannya kedalam beberapa poin dalam pembahasan sebagai berikut:

A. Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis

1. Berperan Sebagai Koordinator

Pada hakikatnya seorang pemimpin harus mampu berperan sebagai koordinator dari suatu organisasi. Sebagaimana pada dasarnya seorang pemimpin memiliki tugas untuk memberikan suatu pengarahan atau suatu petunjuk yang mana dari arahan tersebut dapat menentukan suatu keputusan yang baik dan juga benar. Dalam penelitian, berdasarkan wawancara bersama bapak Imam Setiyadi Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPP Partai Demokrat DIY menyatakan :

“Secara keseluruhan beliau mampu berperan sebagai koordinator. Kita tahu latarbelakang karir pak SBY adalah dunia militer. Selain itu beliau juga pernah menjadi menko tugasnya mengkoordinir para menteri. Sebagai presiden beliau mampu mengarahkan bawahan kepada tujuan yang hendak dicapai. Sistem yang dianut saat ini adalah desentralisasi, lewat sistem inilah pak SBY mengkoordinir antara pusat dan daerah. Pada akhirnya diterjemahkan dalam RPJMD dengan tetap berpacu pada RPJMN”.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono mampu berperan sebagai koordinator. Beliau mampu untuk mengkoordinir dari berbagai semua unsur-unsur dan komponen-komponen dalam pemerintahan. Beliau mampu mengkoordinir dari Kementerian, Kelembagaan, serta Daerah. Sebagaimana yang kita ketahui sejak adanya reformasi, Indonesia telah menggunakan sistem desentralisasi. Artinya adalah setiap daerah atau provinsi diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kewenangan daerah atau provinsi untuk mengatur wilayahnya masing-masing inilah yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar terjadinya koordinator yang jelas antara daerah dan nasional.

Bapak Imam Setiyadi selaku Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPP Partai Demokrat DIY menyatakan : “Selain itu pada pemerintahan pak SBY pemerintah melakukan peningkatan kualitas hubungan antara pusat dan daerah, salah satu buktinya adalah dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah”.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan pembangunan kelautan yang berdimensi kepulauan, serta melakukan optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan strategi kebijakan berdimensi kewilayahan yang memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pemerataan pelayanan dasar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), mempertahankan momentum di Kawasan Barat Indonesia

(KBI) dan mendorong pemerataan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kawasan Perbatasan. Pada tahun 2014 sebanyak 69 Kabupaten keluar dari status ketertinggalannya, terdapat 26 pembangunan daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana prasarana perbatasan pada 183 Kabupaten, serta peningkatan pada jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis (BAPPENAS, 2014).

Secara konseptual dalam menjalankan pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono mampu berperan sebagai koordinator, akan tetapi dalam sisi pencapaian kinerja dan hasil belum sepenuhnya signifikan. Dalam wawancara dengan Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Dalam tiga tahun pertama hasil yang dicapai belum signifikan, baru pada tahun keempat dan kelima hasil pencapaian baru terlihat. Namun terdapat salah satu prestasi beliau saat itu pada tahun 2008 berhasil menyaring informasi. Pada kasus Lehman Brothers ekonomi dunia sedikit kacau, namun beliau pada waktu itu pintar dalam menyaring informasi sehingga investor tidak lari pada waktu itu. Sehingga Indonesia tidak mengalami permasalahan yang signifikan pada waktu kasus Lehman Brothers saat itu.”.

Berdasarkan pembahasan diatas secara umum disimpulkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu berperan sebagai koordinator dari semua unsur-unsur dan komponen-komponen organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai dalam teori kepemimpinan, bahwa salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah dimana bahwa seorang pemimpin

yang demokratis akan cenderung memandang bahwa peranannya adalah sebagai koordinator yang tidak lain tujuannya adalah agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

2. Menggunakan Pendekatan Holistik dan Integralistik

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai ciri dari pemimpin yang demokratis didalam menjalankan tugasnya akan selalu menggunakan pendekatan holistik dan pendekatan integralistik. Pada gaya kepemimpinan ini, pendekatan holistik dan pendekatan integralistik digunakan dengan tujuan untuk agar semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan dari segala unsur yang ada yang nantinya akan membentuk satu kesatuan yang padu. Semua faktor-faktor ini akan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya agar terwujudnya dari kepentingan bersama.

Sebagai seorang presiden Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu mengambil suatu kebijakan untuk dapat membuat rakyat Indonesia hidup secara merata dan sejahtera. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus beliau yaitu adalah tentang pemenuhan hak dasar manusia salah satunya yaitu adalah pendidikan. Melihat fakta yang terjadi saat ini adalah dimana gambaran pendidikan di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Masih banyak anak-anak Indonesia yang harus putus sekolah dikarenakan kendala biaya, akses jalan ataupun infrastruktur yang masih jauh dari kata layak, dan faktor lainnya adalah kurangnya tenaga pendidikan. Salah satu upaya Susilo Bambang Yudhoyono

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah beliau mengeluarkan berbagai macam program.

Bapak Imam Setiyadi Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPP Partai Demokrat DIY menyatakan : “Pemenuhan hak dasar menjadi fokus beliau pada saat itu, salah satunya pada bidang pendidikan. Pada saat itu beliau mengeluarkan kebijakan dimana pemerataan wajib belajar sembilan tahun. Beberapa upaya yang dilakukan waktu itu, seperti adanya Bantuan Operasional Daerah (BOS), Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Unit Daerah (BUD). Selain itu adanya pengangkatan guru honorer pada kepemimpinan beliau kurang lebih ada 1.000 guru honorer yang diangkat”.

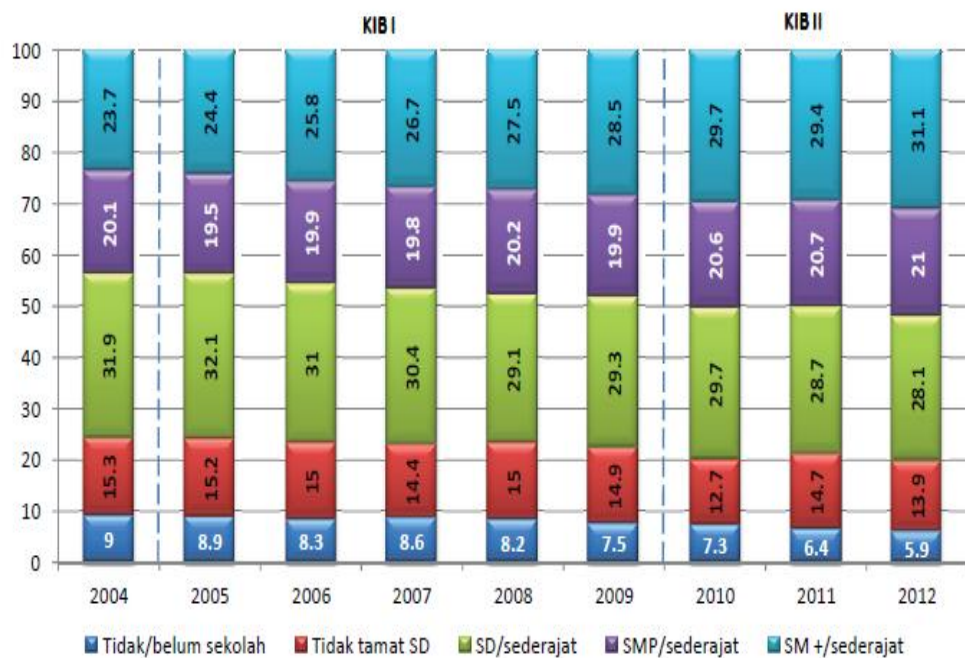
Program-program yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan beliau antara lain ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidikmisi untuk yang melanjutkan kejenjang pendidikan Universitas/Perguruan Tinggi, Beasiswa Unit Daerah (BUD) yang juga diperuntukkan kepada putra dan putri daerah untuk dapat melanjutkan kejenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu pada masa kepemimpinan beliau setidaknya kurang lebih 1.000 pegawai honorer diangkat paada masa kepemimpinan beliau. Tidak lain tujuan dari diangkatnya pegawai honorer ini adalah untuk dapat menyalurkan tenaga-tenaga pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada. Pembangunan pendidikan diarahkan kepada perluasan dan pemerataan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, perluasan dan peningkatan mutu serta relevansi terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan disemua jenjang pendidikan (BAPPENAS, 2014).

Akan tetapi dalam penyaluran dana BOS sering kali terjadi penyelewengan. Sejak tahun 2004-2009 terdapat 33 kasus korupsi terkait dengan dana BOS yang mencapai 12,8 miliar. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme penyaluran dana BOS berasal dari pemerintah pusat namun dana ini ditransfer kepada pemerintah daerah yang akan menjadi sumber APBD. Sehingga masing-masing sekolah tidak menerima secara langsung dari pemerintah pusat. Dengan demikian penyalahgunaan dana BOS dapat saja terjadi dengan didukungnya pengawasan dan partisipasi publik yang kurang. Selain adanya penyelewengan dalam penyaluran dana tersebut terdapat permasalahan lain yaitu adalah pengalokasian dana tersebut tidak didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh setiap masing-masing sekolah namun didasarkan pada ketersediaan anggaran. Dengan demikian hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran. Selain itu pengalokasian dana BOS dipukul secara rata untuk masing-masing sekolah, sedangkan masing-masing sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda (TribunNews, 2014).

Pembangunan pendidikan diarahkan dengan perluasan dan pemerataan wajib belajar sembilan tahun (pendidikan dasar). Anggaran pendidikan dalam APBN dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan ini pemerintah sudah memenuhi amanat dari pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20% dari belanja negara (BAPPENAS, 2014).

Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Pendidikan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono



Sumber : Kemendikbud

Berdasarkan gambar diatas taraf pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan, yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari setiap tahunnya. Peningkatan atas lamanya sekolah untuk tingkat SMA/Sederajat. Terbukti adanya peningkatan yang terjadi pada angka SMA atau sederajat yang mana 23,7% pada tahun 2004 menjadi 28,5% pada tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 31,% pada tahun 2012. Selain

itu adanya penurunan pada angka tidak sekolah tau belum sekolah. Dimana mencapai angka 9% pada tahun 2004 lalu menurun menjadi 7,5% pada tahun 2009 dan terjadi penurunan kembali menjadi 5,9% pada tahun 2012.

Berdasarkan pembahasan diatas program yang ditawarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menggunakan pendekatan holistik dan integralistik, yang mana semua faktor-faktor diperhitungkan yang tujuannya untuk dapat terwujudnya keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, namun hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan secara optimal.

3. Memperlakukan Manusia Dengan Cara Yang Manusiawi

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Seorang presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang suatu konteks dari negara, suatu negara tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam ranah domestik saja. Namun suatu negara juga memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diranah internasional. Terkhususnya Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa negara Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia (Undang-Undang Dasar 1945).

Susilo Bambang Yudhoyono dalam era kepemimpinannya menerapkan politik luar negeri yang kondusif yang memiliki tujuan untuk membangun stabilitas nasional ataupun stabilitas internasional yang lebih sering dikenal dengan semboyan *All Directions Foreign Policy* (Politik Luar Negeri Kesegala Arah). Selain itu beliau juga menerapkan paham *A Million Friends Zero Enemy* yang dalam suatu artian merangkul teman sebanyak-banyaknya dan meminimalisir adanya permusuhan. Dengan manganutnya paham ini yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga negara-negara di kawasan Asia Pasific (Ardani, 2015).

Selain menerapkan paham *A Million Friends Zero Enemy*, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengedepankan cara dan gaya berdiplomasi yang mengedepankan cara *soft power*. Dengan menggunakan cara berdiplomasi yang *soft power* inilah yang pada akhirnya membuat Indonesia terlibat dalam salah satu upaya penyelesaian permasalahan dunia. Indonesia terlibat dalam upaya membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar. Dalam upaya membantu penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar, kebijakan yang diambil oleh beliau adalah lebih mengedepankan kepada metode penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan dengan cara *soft diplomasi*, kerja sama dan tetap memegang prinsip non intervensi. Upaya dalam penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar dilakukan secara bilateral maupun

multilateral dengan melibatkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Ardani, 2015).

Pada keterangan press hari Sabtu, 04 Agustus 2012 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan “pemerintah bukan hanya prihatin, tapi telah, sedang, dan akan terus melakukan berbagai upaya, baik itu diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar” (Nurhandayani, 2013).

Pemerintah telah mengirimkan surat perintah resmi pada pemerintahan Rangoon dengan menginformasikan agar pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik etnis yang terjadi. Selain itu dilakukannya pengiriman utusan khusus, yang mana dalam hal ini Jusuf Kalla ditunjukkan sebagai utusan khusus untuk melakukan diplomasi dalam upaya membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar yang melibatkan muslim Rohingya.

“Jusuf Kalla sebagai *Special Envoy* (utusan khusus), saya berharap pak JK dengan pengalamannya yang luas bisa menjadi *special envoy* kita agar kepedulian dan solidaritas Indonesia terhadap isu kemanusiaan Rohingya itu tepat tidak menimbulkan salah pengertian bagi Myanmar tetapi juga benar-benar membantu saudara kita etnis Rohingya” (Nurhandayani, 2013).

Selain itu Indonesia memberikan bantuan untuk pembangunan 3 unit Sekolah Dasar di daerah bagian Rakhine, bantuan ini sebagai upaya dari penyelesaian masalah di Rakhine yang tengah mengalami konflik komunal. Pada tahun 2008 Indonesia juga terlibat dalam pembangunan rumah sakit di dekat Laut Andaman. Indonesia melakukan komitmen yang kuat dengan membuat program peningkatan kapasitas pembangunan bagi Myanmar

dengan periode 2013-2015 dalam bidang demokratisasi, nasional serta pembangunan sosial ekonomi (Nurhandayani, 2013).

Berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia, terdapat kesamaan antara paham yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Recep Tayyip Erdogan. Paham yang diterapkan oleh Recep Tayyip Erdogan dikenal dengan sebutan *Al-Amq Al Istratijii* (strategi politik intensif) dengan mengedepankan terhadap sikap keterbukaan dan politik *soft power* terhadap negara-negara kawasannya. Erdogan menggunakan cara *soft power* diplomasi terhadap isu-isu yang terjadi di Timur Tengah serta konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kebijakan yang diambil oleh Erdogan adalah lebih mengedepankan cara mediasi dan komprehensif yang menekankan pada aspek *soft power* diplomasi dalam upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina (Wicaksono, 2016).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan yang demokratis seorang pemimpin akan memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi. Jika merujuk pada salah satu ciri tersebut kedua pemimpin ini dalam pengambilan keputusan penyelesaian suatu konflik, kedua pemimpin ini telah memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi. Hanya saja yang menjadi pembeda antara kedua pemimpin ini adalah terletak pada daerah atau wilayah kawasannya. Susilo Bambang Yudhoyono berfokus pada penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar, Myanmar sendiri merupakan wilayah yang masuk dalam kawasan

Asia Tenggara. Sedangkan Recep Tayyip Erdogan berfokus pada penyelesaian konflik Israel dan Palestina, dua wilayah ini masuk dalam kawasan wilayah Timur Tengah, sebagaimana Turki juga masuk dalam wilayah kawasan Timur Tengah.

4. Menindaklanjuti Bawahan Yang Melanggar

Seorang pemimpin yang demokratis dalam menindaklanjuti bawahan yang melanggar etika kerja akan menggunakan pendekatan yang bersifat korektif dan edukatif. Pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhono banyak sekali terjadi kasus korupsi, hampir sebagian besar yang terjerat dalam kasus korupsi merupakan kader dari partai demokrat. Bapak Imam Setiyadi selaku Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPP Partai Demokrat DIY menyatakan :

“Iya kita tahu pada masa pak SBY kasus korupsi banyak terjadi, dan rata-rata adalah kader partai demokrat. Beberapa nama antara lain ada Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan masih banyak lagi. Dan beliau bersikap adil pada saat itu, ketika kader partainya terbukti bersalah maka harus tetap dihukum dan ditindaklanjuti”.

Salah satu nama yang terjerat kasus korupsi ada Andi Alfian Mallarangeng beliau merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga ini divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi megaprojek stadion olahraga di Bukit Hambalang pada 18 Juli 2014. Beliau resmi mengundurkan diri pada 7 Desember 2012 setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2012. Beliau terjerat dalam kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).

Berdasarkan hasil keputusan sidang beliau dihukum 4 tahun penjara (Khamelia, 2018).

Selain Andi Alfian Mallarangeng, nama lain yang tersandung dalam kasus korupsi di kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ada Agelina Sondakh. Angie ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek wisma atlet di Palembang oleh KPK pada 3 Februari 2012. Ditingkat pertama Angie divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Namun pada tingkat kasasi, hukuman dinaikkan tiga kali lipat hingga menjadi 12 tahun penjara. Namun dari pihak Angie mengajukan peninjauan kembali. Walau tidak sepenuhnya dikabulkan, pihak Mahkamah Agung hanya memberikan ampunan dua tahun. Sebelumnya dengan hukuman selama 12 tahun penjara kemudian menjadi hukuman selama 10 tahun penjara (Khamelia, 2018).

Selain dua nama diatas Suryadharma Ali juga masuk dalam daftar kasus korupsi dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah Menteri Negara Koperasional dan Usaha Kecil Menengah pada periode 2004 hingga 2009. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2009. Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyelenggaraan dana haji di Kementerian Agama pada tahun 2010 hingga 2011. Beliau divonis dengan hukuman 6 tahun penjara, namun beliau mengajukan banding akan tetapi pengajuan banding ditolak dan juga memperberat masa hukuman yang sebelumnya 6 tahun menjadi 10 tahun. Tidak hanya itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI juga menjatuhkan

pidana tambahan yaitu berupa pencabutan atas hak politik terhadap beliau (Khamelia, 2018).

Dalam sambutan Rakernas Partai Demokrat di Mataram, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan : “Ada atau tidak kader Demokrat yang terkena korupsi, Demokrat konsisten dukung KPK. Karena Demokrat menolak dan tidak setuju hak angket DPR terhadap KPK, itu berbahaya. Kalau mau jujur-jujuran, Partai Demokrat paling bermasalah dengan KPK” (Thayib, 2017).

Pada pemilihan legislatif tahun 2009 Partai Demokrat mendapatkan 20,85% suara sah nasional dan menguasai 148 kursi DPR. Akan tetapi tahun 2014 menurun drastis akibat banyaknya isu tentang kader partai demokrat yang menjadi pasien KPK. Berkat kepandaian SBY dan kerja keras kader-kader partai demokrat dapat dengan cepat memperbaiki keadaan dan mampu menepati posisi 4 dengan mendapatkan 10,19% suara nasional dan 61 kursi DPR. Akan tetapi tidak ada politik balas dendam, Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyelewengkan kekuasaannya untuk melemahkan KPK (Thayib, 2017).

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso melalui surat No.PW01/0054/DPR-RI/1/2011 mengajukan usulan terhadap Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Awalnya usulan terhadap RUU KPK ini direspon cepat oleh DPR, sehingga adanya wacana revisi UU KPK, akan tetapi Susilo Bambang Yudhoyono menolak hal tersebut dan pada tanggal 08 Oktober 2012 beliau menghentikan rencana DPR. Beliau lebih menfokuskan kepada upaya untuk meningkatkan kinerja dari pemberantasan kasus korupsi agar kinerja lebih

baik dan berhasil ketimbang harus lebih kepada memberikan perhatian dan menghabiskan waktu dan juga energi yang digunakan hanya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Tidak hanya itu beliau juga mengeluarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi, koruptor yang berperan sebagai *justice collaborator* yang diberikan kelonggaran selebihnya tidak ada ampunan. Tidak ada seorang koruptor pun yang diberikan remisi (Thayib, 2017).

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dimasa kepemimpinan beliau, namun demikian beliau tetap memberikan hukuman kepada para bawahan yang telah melakukan tindakan korupsi dengan bantuan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sekalipun yang terlibat adalah sebagian besar dari partai beliau, namun beliau tidak pandang bulu terhadap siapapun. Dan beberapa diantara mereka melakukan peninjauan kembali untuk diringankan hukumannya, namun semuanya tidak dikabulkan.

5. Mendengarkan Pendapat, Saran, dan Kritikan

Berdasarkan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rivai bahwa salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah bahwa seorang pemimpin akan mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritikan dari para bawahannya ataupun dari orang lain. Hasil wawancara dengan Yobi Afis

Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Pada zaman pak SBY ada strategi yang namanya gelombang bocor. Siapapun yang mau mengkritik pemerintah dipersilahkan, sampai capek mengkritik. Hingga pada akhirnya dia akan berhenti secara sendiri. Diibaratkan gelembung, semakin keatas semakin pecah. Solusi inilah yang dipakai oleh pak SBY. Kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi pada masa pak SBY”.

Salah satu kebijakan beliau yang banyak menuai kritikan dari masyarakat adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa kepemimpinan beliau. Atas kebijakan inilah yang pada akhirnya membuat beliau mengeluarkan kebijakan baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk dari kompensasi kenaikan BBM. Tercatat pada masa kepemimpinan beliau terjadi empat kali kebijakan kenaikan terhadap BBM dan dua kali kebijakan menurunkan harga BBM (Riyandi, 2018). Tidak hanya warga negara saja yang ikut mengkritik atas kebijakan ini. Beberapa dari partai yang ada di Indonesia juga mengkritik kebijakan ini, salah satunya adalah dari partai PDIP yang menolak kebijakan tersebut. Hasil wawancara dengan Fitria Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyatakan :

“Jelas banyak dinamika yang terjadi pada saat itu, mahasiswa banyak melakukan aksi turun kejalan akibat kebijakan ini dikeluarkan. Belum lagi oposisi partai pun terjadi saat itu, salah satunya iya PDIP dan Gerindra saat itu yang secara keras menolak kebijakan itu. Memang pada masa pak SBY penyampaian itu banyak dilakukan secara langsung iya dengan melalui aksi demonstrasi turun kejalan. Tetapi justru lewat strategi ini terbangun komunikasi secara langsung, maka dari itu pada zaman pak SBY dinamika politik itu lebih sering terjadi”.

Tabel 3.1 Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap BBM

No	Tahun	Keterangan
1.	Maret 2005	Rp 1.820/liter kemudian naik menjadi Rp 2.400/liter
2.	Oktober 2005	Rp 2.400/liter kemudian naik menjadi Rp 4.500/liter
3.	2008	Rp 4.500/liter kemudian naik menjadi Rp 6.500/liter
4.	2008	Pada tahun yang sama terjadi penurunan BBM dua kali menjadi Rp 5.000/liter
5.	2009	Rp 5.000/liter turun kembali menjadi Rp 4.500/liter
6.	2013	Rp 4.500/liter naik kembali menjadi Rp 6.500/liter

Sumber : Jawa Pos

Hasil wawancara dengan bapak Imam Setiyadi Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPD Partai Demokrat DIY menyatakan : “Pada akhirnya setiap kebijakan akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Tetapi sebelum beliau menetapkan kebijakan tersebut, setidaknya beliau telah memberikan informasi terlebih dahulu. Jika dikatakan ini memiliki dampak yang signifikan, jelas dampaknya pasti signifikan. Akan tetapi paling tidak setelah informasi ini diberikan masyarakat dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi setelah kebijakan ini ditetapkan”.

Berdasarkan pembahasan diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjalankan ciri dari pemimpin yang demokratis yaitu mendengarkan pendapat, saran dan kritikan. Hal ini dibuktikan pada masa kepemimpinan beliau, beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Siapapun diperbolehkan untuk mengkritik pemerintah. Dengan sikap beliau yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dapat dikatakan beliau telah menjalankan salah satu ciri dari kepemimpinan yang demokratis.

6. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Berprestasi

Salah satu ciri lain dari pemimpin yang demokratis adalah bahwa pemimpin akan selalu menunjukkan serta memberikan penghargaan kepada para bawahannya yang memiliki prestasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para bawahan yang memiliki prestasi yang baik dan juga bagus. Tentunya dengan adanya hal ini akan menjadi suatu motivasi kepada para bawahan untuk dapat bekerja secara lebih baik lagi. Selain untuk memotivasi, adanya bentuk apresiasi ini akan menjadikan para bawahan menjadi lebih dihargai atas apa yang telah dikerjakan oleh para bawahannya. Dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau pernah memberikan penghargaan kepada menteri kabinetnya. Tepatnya pada tahun 2013 beliau memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana kepada tujuh orang menteri (Laoli, 2013).

Penghargaan ini diberikan oleh beliau dikarenakan para menteri ini dinilai telah berjasa atas pengabdianya kepada negara Indonesia. Beliau menilai bahwa ketujuh orang menteri ini telah membantu beliau secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan pada masa kepemimpinannya. Ketujuh orang menteri ini dinilai telah berjasa dan telah banyak memberikan kontribusinya kepada warga masyarakat di Indonesia. Sebagaimana seorang presiden memiliki hak prerogatif, ketujuh menteri yang diberikan penghargaan oleh presiden ini atas dasar pertimbangan dari beliau. Walaupun beliau memiliki hak prerogatif akan tetapi bukan alasan beliau

memberikan penghargaan tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang telah diambil oleh beliau untuk dapat memberikan penghargaan kepada ketujuh menteri tersebut (Laoli, 2013).

Tabel 3.2 Penghargaan Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Menteri

No	Nama	Menteri
1.	Hatta Rajasa	Menteri Koordinator Perekonomian
2.	Jero Wacik	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Joko Kirmanto	Menteri Pekerjaan Umum
4.	Mari Elka Pangestu	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	Muhammad Nuh	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Sudi Silalahi	Menteri Sekretaris Negara
7.	Suryadharma Ali	Menteri Agama

Sumber : Kontan News

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2013 Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan penghargaan kepada presiden Joko Widodo. Yang mana pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada pemerintah DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan dinilai bahwa pemerintah DKI dinilai mempunyai program-program yang berpihak kepada atas perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak-anak. Penghargaan ini diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo bertepatan pada peringatan hari ibu yaitu 22 Desember 2013. Penghargaan ini ada dua yaitu Utama dan Madya. Ada 16 Provinsi yang diberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Utama dan ada 13

provinsi yang diberikan penghargaan Anugra Parahita Ekapraya Madya (Kuwado, 2013).

Selain dua penghargaan diatas yang diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada bawahannya. Beliau juga pernah memberikan penghargaan kepada abdi negara. Pada tanggal 1 Juli 2013 dalam upacara Hari Ulang Tahun ke 67 Bhayangkara. Beliau memberikan penghargaan kepada anggota Polri setidaknya ada 4.625 anggota Polri yang menerima penghargaan dari beliau. Mulai dari perwira tinggi sampai brigadir polisi, penghargaan yang berikan oleh beliau adalah bintang kehormatan Nararya. Tidak hanya Polri saja yang diberikan penghargaan oleh beliau, dalam upacara Hari Ulang Tahun TNI ke 69 di Biak, Papua. Beliau juga memberikan penghargaan kepada tiga orang prajurit TNI di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ketiga prajurit ini menerima penghargaan Satya Kesetiaan, yaitu ada Kapten Armed Sumarno, Serda Heri Wahyu dan Praka Tama Heryanto (Ramadhan, 2014).

Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikatakan beliau telah melakukan salah satu ciri dari kepemimpinan demokratis. Salah satu ciri dari kepemimpinan yang demokratis adalah bahwa pemimpin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para bawahannya yang dianggap memiliki prestasi. Penghargaan ini dinilai sebagai atas dasar kinerja para bawahannya yang telah banyak memberikan kontribusinya pada masa pengabdianya kepada masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beliau telah melakukan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis

B. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis

1. Berperan Sebagai Koordinator

Sebelum menjadi seorang presiden Indonesia terlebih dahulu Joko Widodo menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta. Bukan menjadi hal yang baru bagi beliau dalam urusan memimpin. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Praswanto Ketua DPD Partai PDIP DIY mengatakan :

“Sebelumnya pak Jokowi sudah pernah memimpin kota Solo dan juga Jakarta. Beliau mengadopsi kepemimpinan Jawa yang lebih kita kenal dengan istilah Tut Wuri Handayani. Dalam kepemimpinannya beliau menerapkan paham tersebut. Dengan tetap menerapkan konsep desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing”.

Sebagaimana sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem desentralisasi. Artinya adalah dimana daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Mengingat salah satu konsep yang ditawarkan oleh beliau pada 2014 silam adalah memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah. Prioritas utamanya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat daya saing Indonesia secara global. Desentralisasi dilakukan didasarkan pada pendekatan kewilayahan terutama pada Bappenas dan Kementerian Koordinator.

Menurut Muchtar Effendi Harahap (seorang peneliti senior NSEAS) beliau mengatakan “Adanya fragmentasi dalam tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan politik desentralisasi dipusat, serta dominasi rezim sektoral. Jokowi akan memecahkan masalah ini dengan pengutamaan pendekatan kewilayahan, terutama Bappenas dan Kementrian Koordinator pada kenyatannya dominasi rezim sektoral dan keuangan masih menguat, dan tidak ada perubahan berarti” (Dieda, 2018).

Selain hal diatas, dalam konsep yang di janjikan beliau yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawa Cita, mengubah kebijakan dana alokasi umum (DAU) upaya untuk mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) dan harus adanya tahapan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB). Hal ini harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh langsung terbentuk, namun pada pelaksanaannya selama masa pemerintahan beliau belum ada pembentukan DOB. Setidaknya terdapat 314 DOB yang tertunda pemekarannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan hal yang sama. Usulan ini sulit direalisasikan karena untuk melakukan pemekaran daerah membutuhkan anggaran yang cukup besar (Dieda, 2018).

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo beliau mengatakan “anggaran negara sedang diprioritaskan dulu untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah” (Dieda, 2018).

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla beliau mengatakan “seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kami harus selesaikan dulu masalah pokoknya, ya masalah anggaran itu” (Dieda, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitria Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia : “Fokus pemerintah saat ini memang betul lebih kepada pembangunan infrastruktur. Untuk sisi pelayanan masih sangat kurang, seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Tetapi harus diimbangi dengan pembangunan manusiannya juga”.

Penerapan desentralisasi bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia mengingat sejak terjadinya reformasi banyak perubahan yang dialami oleh Indonesia salah satunya adalah desentralisasi. Berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa secara konseptual penerapan desentralisasi sudah dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Akan tetapi yang masih menjadi permasalahan adalah pada hasil atau capaian yang hendak dicapai. Dimana pemerintah lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang besar sehingga terdapat program yang terhambat dalam pelaksanaannya. Salah satunya terhambatnya upaya pembentukan daerah otonom baru. Selain itu pemerintah kurang berfokus pada pembangunan manusiannya. Sehingga capaian yang didapatkan belum sesuai dengan tujuan awal.

2. Menggunakan Pendekatan Holistik dan Integralistik

Permasalahan pendidikan juga menjadi fokus utama presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Pipit Safitri selaku Anggota DPD Partai PDIP DIY mengatakan :

“Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat menjadi solusi untuk anak-anak Indonesia. Yang sebenarnya program ini adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang tujuannya adalah dapat terwujudnya wajib belajar dua belas tahun”.

Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini untuk seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin atau telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebenarnya program ini adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada akhir tahun 2014. Tujuan dari program ini agar dapat mewujudkan program wajib belajar dua belas tahun yang mana merupakan program lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Untuk tingkat SD dana bantuan sebesar Rp 225ribu sedangkan untuk tingkat SMP sebesar Rp 375ribu, dan untuk tingkat SMA sebesar Rp 500ribu. Akan tetapi sejak tahun 2017 terjadi perubahan, tingkat SD menjadi Rp 400ribu, SMP menjadi Rp 500ribu dan SMA menjadi Rp 700ribu (Meiliana, 2018).

Secara konsep program ini telah sesuai hanya saja dalam pemberian dan penyalurannya yang masih memiliki beberapa masalah. Pemecahan masalah atas program ini melibatkan beberapa pihak yaitu Kemendikbud, Kementerian BUMN dan presiden. Sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan jika tidak terjadi ego sektoral dan mengikuti perintah presiden. Sebagaimana program ini merupakan janjinya presiden kepada rakyat Indonesia. Rini Soemarno selaku Menteri BUMN tinggal meminta kepada direktur utama BRI dan BNI (yang ditugaskan untuk menyalurkan KIP) untuk dapat menyalurkan KIP secara tepat waktu. Dengan demikian kinerja

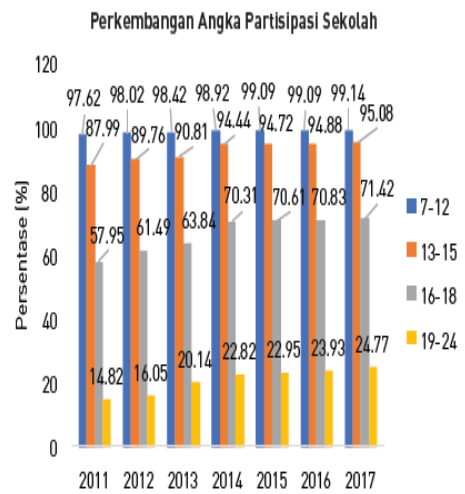
para direksi juga dapat diapresiasi sebagai bentuk komintem dalam kerjanya (Meiliana, 2018).

kebijakan lain yang dilakukan dalam pemerintahan Joko Widodo, yaitu adalah mengenai kurikulum pembelajaran. Beliau mengganti kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum 2013. Kurikulum yang baru ini memiliki beberapa dampak positif bagi siswa. Salah satu dampak positif dari kurikulum ini adalah dimana terdapat peningkatan dan keseimbangan antara *soft skill* dan *hard skill* dari seorang siswa. Dengan meliputi beberapa aspek, antara lain aspek kompetensi, sikap, keterampilan serta pengalaman. Hasil wawancara dengan Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Penerapan kurikulum 2013 satu sisi membawa dampak positif, tetapi disisi lain membawa dampak negatif. Adanya penambahan waktu belajar siswa tentu akan mengganggu konsentrasi siswa. Siswa itu memiliki batas waktu dalam penerimaan materi pembelajaran, jika kelamaan maka akan timbul rasa bosan hal ini pada akhirnya membuat siswa menjadi tidak fokus”.

Menurut Fitri Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyatakan : “Permasalahan yang terjadi tidak hanya pada kurikulum, namun juga dari tenaga pendidikan itu sendiri. Begitu banyak tenaga pendidikan yang datang kesekolah hanya sekedar hadir, tidak peduli dengan bagaimana kualitas dari siswa. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan untuk presensi kehadiran jika tidak hadir maka tidak akan diberikan gaji kepada guru tersebut. Belum lagi permasalahan lain yang terjadi adalah banyaknya guru honorer, bahkan sampai bertahun-tahun mengabdikan menjadi guru honorer”.

Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pendidikan Era Joko Widodo



Sumber : Kemendikbud

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terhadap harapan lama sekolah. Yang mana mencapai angka 12,39 pada tahun 2014 dan kemudian meningkat menjadi 12,72 pada tahun 2016 serta menjadi 12,85 pada tahun 2017. Peningkatan angka harapan lama sekolah seiring dengan kenaikan dari angka partisipasi sekolah berdasarkan dari berbagai jenjang kelompok umur. Untuk umur 16 sampai 18 tahun pada tahun 2014 mencapai 22,82 kemudian meningkat menjadi 23,93 pada tahun 2016. Kemudian meningkat kembali menjadi 24,77 pada tahun 2017.

Dari pembahasan diatas disimpulkan secara konseptual program yang ditawarkan sangatlah bagus, berusaha untuk mewujudkan agar anak Indonesia dapat merasakan sekolah tanpa harus terbebani biaya selain itu siswa tidak hanya pandai dalam bidang *hard skill* saja namun juga pandai dalam bidang *soft skill*. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi didalamnya. Sehingga menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan diawal.

3. Memperlakukan Manusia Dengan Cara Yang Manusiawi

Politik luar negeri masa kepemimpinan Joko Widodo menerapkan paham politik bebas aktif. Fokus permasalahan internasional pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah lebih menfokuskan pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Dengan menerapkan beberapa strategi yang digunakan agar dapat membantu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menjadi motor serta penggagas atas terbukanya kerja sama multilateral diantara negara-negara yang terlibat aktif di dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (Saragih, 2018).

Terdapat 4 kategori dalam konflik laut cina selatan antara lain perebutan wilayah, lokasi untuk perikanan, eksplorasi dan pengembangan minyak, dan gas. Pada dasarnya konflik ini bukanlah konflik yang terjadi secara menyeluruh di kawasan negara Asia Tenggara konflik ini berpusat pada tumpang tindih antara negara Thailand, Vietnam dan Filipina. Namun pada perkembangannya negara Brunei, Malaysia, dan Indonesia juga ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan konflik laut cina selatan. Konflik ini berawal sejak tahun 1990-an, diawali dengan perebutan klaim sumber daya alam. Sumber daya laut, wilayah perikanan, minyak serta gas yang menjadi fokus utama dalam konflik laut cina selatan. Dimana Cina mengklaim bahwa Kepulauan Spratly dan Paracel dan semua wilayah lautnya untuk mencegah

negara Filipina, Vietnam, dan Malaysia dari pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang diklaimnya. Dan Cina juga mengklaim beberapa wilayah sebelah barat daya dari Kepulauan Spratly, padahal wilayah tersebut berada dalam gugusan Kepulauan Natuna (Freindensan, 2017).

Dibawah kepemimpinannya beliau terus melakukan tindakan unilateral dengan tujuan untuk memperkuat posisi Indonesia itu sendiri di Kepulauan Natuna. Walaupun dalam menjalankan peranannya Indonesia belum secara maksimal. Namun demikian dengan terlibatnya Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pelopor. Indonesia menjadi penggagas serta menjadi salah satu jembatan dari terbentuknya forum-forum yang diadakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada pemerintahan Joko Widodo beberapa upaya diplomasi dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan hal tersebut, antara lain sebagai berikut (Freindensan, 2017).

Pertama, langkah awal yang dilakukan adalah dengan memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna, walaupun pada kenyatannya upaya ini belum mampu dilakukan secara optimal. Kedua, upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pangkalan militer Indonesia. Pangkalan militer ini terletak bersebrangan dengan laut cina selatan. Tujuan pembuatan pangkalan militer ini adalah berfokus pada strategi dalam aspek udara, sebagai

antisipasi jika terjadi aktivitas militer di Kepulauan Natuna. Ketiga, dalam aspek kelautan hal dilakukan adalah dengan cara memperbarui kapal perang yang memiliki tujuan untuk menjaga agar kawasan tersebut tetap dapat berjalan secara stabil. Keempat, dengan melalui forum-forum resmi yang dilakukan oleh ASEAN, yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral agar dapat memunculkan solusi atas permasalahan ini.

Setidaknya terdapat tambahan satu batalion untuk memperkuat pangkalan militer angkatan laut di Kepulauan Natuna. Terhitung sejak tahun 2016, terdapat penambahan 800 prajurit sehingga jumlahnya menjadi 2.000 prajurit. Tidak hanya penambahan prajurit yang dilakukan, namun juga dilakukan pengiriman tujuh kapal terbang di Kepulauan Natuna. Pada April 2018, Angkatan Laut Indonesia mengirimkan 14 kapal terbang untuk mengawasi laut cina selatan yang dilakukan dengan berkeliling dan menjaga kedaulatan. Tidak hanya itu pertahanan udara juga dilakukan dengan mengerahkan radar pada beberapa bagian tertentu dengan melakukan peroperasian dilakukan selama 24 jam. Disisi lain upaya yang dilakukan adalah, Indonesia menandatangani perjanjian dengan negara Jepang untuk penerimaan teknologi peralatan militer, yang tidak lain sebagian besar penerimaan teknologi ini dikirim untuk digunakan di Kepulauan Natuna (Freindensan, 2017).

Dengan berdasarkan pembahasan diatas langkah yang diambil oleh Joko Widodo lebih menekankan kepada penguatan posisi Indonesia di Kepulauan

Natuna, dengan melakukan beberapa strategi yang telah dilakukan. Hal ini harus menjadi fokus dari pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan tentu banyak pulau-pulau yang berada diluar provinsi itu sendiri. Dengan demikian Indonesia harus lebih memperhatikan situasi yang terjadi dilapangan agar daerah-daerah atau pulau-pulau terluar di Indonesia tidak mudah diklaim oleh negara lain. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, secara teknis langkah yang diambil Joko Widodo dalam penyelesaian konflik laut cina selatan menggunakan cara yang damai, dengan penyelesaian masalah secara damai dapat dikatakan beliau telah melakukan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis. Salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi.

4. Menindaklanjuti Bawahan Yang Melanggar

Seorang pemimpin yang demokratis akan selalu menindaklanjuti bawahan yang melanggar. Kasus yang terus menjadi perhatian di Indonesia adalah kasus tindakan korupsi. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo sebut saja salah satunya adalah Idrus Marham beliau adalah Menteri Sosial dimasa kepemimpinan Joko Widodo yang terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Pada akhirnya beliau mengundurkan diri pada tanggal 24 Agustus 2018 terhitung sejak ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka, beliau adalah Wakil Komisi VII DPR RI. KPK mengatakan bahwa Idrus Marham adalah orang yang membantu Eni Maulani

Saragih dalam kasus proyek suap pembangunan PLTU Riau 1 (Khamelia, 2018).

Hasil wawancara dengan bapak Bambang Praswanto Ketua DPD Partai PDIP DIY menyatakan : “Pak Jokowi selama menjabat presiden tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Jika terbukti bersalah maka harus ditindaklanjuti, salah satu buktinya waktu itu adalah pak Jokowi membentuk tim 7 sebagai upaya penyelesaian kasus Cicak Versus Buaya Jilid III. Dan kita harus mengapresiasi hal itu”.

Berbeda halnya dengan bapak Bambang Praswanto, terdapat dua pandangan yang berbeda, Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan : “Memang betul pak Jokowi membentuk tim 7 untuk menyelesaikan kasus terkait dengan calon Kapolri Budi Gunawan. Akan tetapi beliau cenderung pasif saat itu, karena pembentukan tim itu baru ada setelah adanya desakan dari berbagai masyarakat”.

Walaupun beliau menindaklanjuti para bawahannya yang terbukti melakukan korupsi. Namun disisi lain Joko Widodo lebih memilih untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, bahwa gagasan awal terkait dengan wacana merevisi Undang-Undang berawal dari pemerintah. Kemudian usulan dari pemerintah inilah yang lalu disetujui di paripurna DPR RI. Salah satu buktinya adalah dengan ketika waktu itu Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan langsung muncul dengan adanya empat poin usulan terhadap revisi Undang-Undang KPK versi pemerintah. Walaupun pemerintah menolak terhadap adanya revisi, mungkinkah adanya terdapat empat poin usulan. Walaupun pada akhirnya Joko Widodo menolak revisi terhadap

Undang-Undang KPK yang menjadi salah satu faktor besarnya adalah akibat adanya desakan dari publik terhadap beliau (Khamelia, 2018).

Fitria Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengatakan : “Pemberian remisi itu sangat bertentangan dengan kinerja KPK, jika didasarkan pada HAM tidak cukup kuat menjadi satu alasan remisi itu diberikan. Bahkan jika terus menerus diberikan maka tidak akan menimbulkan efek jera kepada koruptor itu sendiri”.

Dimasa kepemimpinan Joko Widodo adanya pemberian ruang remisi kepada koruptor. Pemberian remisi ini diberikan dengan dasar alasan hak asasi manusia. Dengan adanya pemberian remisi ini kepada para terpidana kasus korupsi maka tidak akan memberikan efek jera yang signifikan kepada para koruptor. Dan apabila pemberian remisi ini dilakukan secara berulang-ulang kepada para pelaku kasus korupsi maka hal ini akan bertentangan dengan semangat dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Jika hanya dengan alasan atas dasar hak asasi manusia, maka dapat dikatakan tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk dari hak asasi manusia, yang terjadi malah akan dapat membuat kinerja dari KPK menjadi melemah (Thayib, 2017).

Salah satu kasus pemberian remisi kepada koruptor terjadi pada remisi natal tahun 2017. Beliau adalah Jefferson Soleiman Montesque Rumanjar mantan Wali Kota Tomohon tahun 2005-2010 yang terjerat kasus jual beli predikat WTP di Tomohon. Beliau mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari remisi. Selain itu ada Hardy Stefanus yang terjerat dalam kasus suap satelit Bakamla beliau merupakan salah satu pejabat dari PT Melati Technofo

Indonesia, beliau diberikan remisi 1 bulan atas dasar telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan pertimbangan dari KPK. Sama halnya dengan Dandung Pamularno beliau merupakan Senior Manager di PT Brantas Abipraya yang terjerat kasus suap PT Brantas Abipraya beliau juga mendapatkan remisi 1 bulan dan telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan pertimbangan dari KPK (RepublikaNews, 2017).

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa secara umum beliau telah menindaklanjuti bawahan yang melanggar, yaitu bawahan yang terbukti dalam kasus korupsi melalui kerja dari KPK. Namun disisi yang lain, beliau lebih berfokus kepada melakukan revisi undang-undang, akan tetapi tidak melakukan peningkatan kualitas kinerja dari KPK. Jika hanya berfokus pada melakukan revisi namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja maka hasilnya akan sama saja. Bagaimanapun juga peningkatan kualitas kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

5. Mendengarkan Pendapat, Saran, dan Kritikan

Rivai mengemukakan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah mendengarkan pendapat, saran dan kritikan. Hasil wawancara dengan Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Pada zaman pak Jokowi kebebasan berpendapat itu kurang dijunjung tinggi, beberapa contoh kasus pembuatan meme selalu kena UU IT. Dan memang oposisi banyak dirangkul pada zaman pak Jokowi. Itu sebabnya banyak suara yang pecah, makanya dinamika yang terjadi tidak berjalan rapih”.

Kebijakan dari pemerintah yang sering mendatangkan kritikan dari masyarakat, salah satunya adalah kenaikan harga BBM. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo setidaknya sudah beberapa kali terjadi kenaikan harga BBM. Beliau mengumumkan kenaikan harga BBM hanya beberapa jam sebelum kebijakannya tersebut ditetapkan. Tentunya hal ini mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Dengan informasi yang disampaikan secara mendadak akan membuat masyarakat menjadi gelabakkan. Jika kebijakan ini disampaikan jauh-jauh hari sebelum kebijakan tersebut ditetapkan paling tidak masyarakat sudah dapat mengantisipasi dari dampak-dampak yang akan terjadi.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI yakni Hidayat Nur Wahid juga mengkritik atas kenaikan BBM tanpa informasi sebelumnya dari pemerintah “Terutama kenaikan BBM sudah berapa kali tidak diumumkan, atau tengah malam tiba-tiba naik sehingga rakyat mendapatkan kesusahannya” (Afifah, 2018).

Beliau meminta Komisi VII agar memanggil Menteri ESDM atas kasus ini, mengingat pengumuman kebijakan ini telah dilakukan secara berulang kali yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Selain itu beliau juga meminta agar Kementerian ESDM menjelaskan mengenai kenaikan harga dari BBM non subsidi agar tidak terjadi imbas kepada kenaikan dari sejumlah harga bahan pokok lainnya (Afifah, 2018).

“Tapi jelas kenaikan pada tengah malam tanpa pengumuman sebelumnya, jelas ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Saya berharap DPR segera melakukan pemanggilan terhadap Kementerian ESDM untuk mengoreksi hal ini” (Afifah, 2018).

Tabel 3.3 Kebijakan Joko Widodo Terhadap BBM

No	Tahun	Keterangan
1.	2014	Rp 6.500/liter kemudian naik menjadi Rp 8.500/liter
2.	2015	Rp 8.500/liter kemudian turun menjadi Rp 7.600/liter lalu turun kembali menjadi Rp 6.800/liter kemudian naik kembali menjadi Rp 7.300/liter
3.	2016	Rp 7.300/liter turun menjadi Rp 6.950/liter
4.	2017	Rp 6.950/liter turun menjadi Rp 6.500/liter dan sekarang (2018) menjadi Rp 7.000/liter

Sumber : Tribun Jakarta

Selain kebijakan terhadap kenaikan harga BBM, dimasa kepemimpinan Joko Widodo juga telah mencanangkan program BBM satu harga di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang tidak lain memiliki tujuan agar BBM dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama. Terhitung sejak Oktober 2017 kebijakan BBM satu harga ini telah terjadi di dua puluh lima titik wilayah di Indonesia dengan target sebelumnya adalah lima puluh empat titik wilayah di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut antara lain ada Pulau-Pulau Batu (Sumatera Utara), Siberut Tengah (Sumatera Barat), Karimunjawa (Jawa Tengah), Pulau Raas (Jawa Timur), Tanjung Pengamas (NTB), Waingapu (NTT), Long Apari (Kalimantan Timur), Wangi Wangi (Sulawesi Tenggara), Morotai Utara

(Maluku Utara), Moswaren dan Anggi (Papua Barat), Ilaga, Elelim, Kenyam, Kasonaweja, Kobakma, Karubaga & Wenam dan Sugapa(Papua).

Gambar 3.3 Harga BBM Satu Harga



Sumber : Kementerian ESDM

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum presiden Joko Widodo kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Setiap kali penyampaian melalui media sosial lewat konten meme selalu ditindaklanjuti dengan UU IT. Hal ini bertentangan dengan sistem demokratis dimana pada sistem ini kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi, dan dapat dikatakan beliau tidak menjalankan ciri dari pemimpin yang demokratis. Salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah mendengarkan saran, pendapat dan kritikan.

6. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Berprestasi

Berdasarkan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Rivai, bahwa salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah memberikan penghargaan kepada bawahan yang memiliki prestasi. Dimasa kepemimpinannya Joko Widodo telah banyak memberikan penghargaan kepada para bawahannya yang memiliki prestasi yang baik. Pada bulan Agustus 2015 sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 70, beliau memberikan penghargaan kepada empat puluh enam tokoh dengan berbagai macam profesi dari setiap bidang. Setidaknya ada dua puluh dua orang yang mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra. Dengan empat orang menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, sedangkan delapan belas orang lainnya mendapatkan Bintang Mahaputra Utama. Selain itu beliau juga memberikan penghargaan Bintang Jasa kepada empat belas orang, dengan tiga belas orang mendapatkan Bintang Jasa Utama dan satu orang mendapatkan Bintang Jasa Pratama. Dikategori lain beliau juga memberikan penghargaan Bintang Penegak Demokrasi Utama kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu periode 2012 hingga 2017. Dan kategori terakhir adalah penghargaan Bintang Budaya Paradharmas kepada delapan orang (Tempo, 2015).

Tabel 3.4 Penghargaan Joko Widodo Kepada 46 Tokoh

No	Nama	Kategori Penghargaan	
		Bintang Mahaputra Adipradana	Bintang Mahaputra Utama
1.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H	✓	-
2.	Jenderal TNI Purn Dr. Moeldoko	✓	-
3.	Jenderal Polisi Purn Drs. Sutanto	✓	-
4.	Jenderal Polisi Purn H.S. Bimantoro	✓	-
5.	Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H	-	✓
6.	Dr. Harjono, S.H., M.C.L	-	✓
7.	Dr. H. Ahmad Fadli Sumadi, S.H., M.Hum	-	✓
8.	Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum	-	✓
9.	Laksamana TNI Purn Dr. Masetio	-	✓
10.	Marsekal TNI Purn Ida Bagus Putu Dunia	-	✓
11.	Harbrinderjit Singh Dillion	-	✓
12.	Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum	-	✓
13.	Dr. Haryono Umar, Ak., M.Sc	-	✓
14.	M. Thahir Saimima, S.H., M.H	-	✓
15.	Prof. Dr. Ir. Mustafa Abdullah S.H	-	✓
16.	H. Zainal Arifin, S.H	-	✓
17.	Soekotjo Soeparto, S.H., L.I.M	-	✓
18.	Sabam Sirait	-	✓
19.	Franz Magnis Suseno	-	✓
20.	Surya Paloh	-	✓
21.	Harun Nasution	-	✓
22.	Syafii Maarif	-	✓

		Kategori	
		Bintang Jasa Utama	Bintang Jasa Pratama
23.	Almarhum M.Burhan Muhammad	✓	-
24.	Dr (Hc) Ahmad Herywan, L.c., M.Si	✓	-
25.	H. Ganjar Pranowo, S.H	✓	-
26.	Drs.Cornelis, M.H	✓	-
27.	Drs. Frans Lebu Jaya	✓	-
28.	Chistiany Eugenia Paruntu, S.E	✓	-
29.	Dr. Stephanus Malak, M.Si	✓	-
30.	Dr (Hc) Ir. Tri Risma Harini, M.T	✓	-
31.	Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc	✓	-
32.	Dato Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A	✓	-
33.	Mochtar Riady	✓	-
34.	Shoichiro Toyoda	✓	-
35.	Toshihiro Nikai	✓	-
36.	Almarhumah Heri Listyawati Burhan	-	✓
37.	Husni Kamil Malik	Kategori Bintang Penegak Demokrasi Utama	
38.	Muhammad		
39.	KH Mustofa Bisri	Kategori Bintang Budaya Paradharna	
40.	Goenawan Soesatyo Mohammad		
41.	Almarhum Petrus Josephus Zoetmulder		
42.	Almarhum Wasi Jolodoro		
43.	Almarhum Hosesein Djajadiningrat		
44.	Almarhum Nursjiwan Tirtaamidjaja		
45.	Almarhum Hendra Gunawan		
46.	Almarhum Soejoedi Wiroatmojo		

Sumber : Nasional Tempo

Salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis adalah selalu memberikan arahan yang baik kepada para bawahannya agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu seorang pemimpin akan memberikan penghargaan kepada para bawahannya yang memiliki prestasi. Jika melihat dari pemaparan diatas dapat dikatakan beliau telah melakukan atau melaksanakan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis. Beliau memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para bawahannya yang dianggap memiliki prestasi. Penghargaan ini dinilai sebagai bentuk usaha dan kontribusinya dimasa pengabdianya kepada masyarakat Indonesia dan juga dinilai telah banyak membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

C. Komparasi Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis

1. Berperan Sebagai Koordinator

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Sebagaimana hasil wawancara dengan Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Antara SBY dan Jokowi memang berbeda gaya kepemimpinannya. Latarbelakang karir yang menjadi salah satu faktornya. Kita tahu SBY seorang Jenderal, beliau tidak hanya bermain dilapangan namun beliau juga orang kantor. Jadi strateginya main disini. Sedangkan Jokowi

latarbelakang karirnya seorang pengusaha, jadi strategi yang digunakan memang lebih kepada ekonomi. Jadi jelas berbeda antara keduanya”.

Selain itu bapak Bambang Praswanto Ketua DPD Partai PDIP DIY menyatakan : “Jelas memang berbeda antara sikap pak SBY dan Jokowi. Pak SBY gaya kepemimpinan beliau memang cerminan pribadi beliau, sedangkan pak Jokowi beliau meniru cara kepemimpinan Jawa (Tut Wuri Handayani)”.

Sedangkan untuk kesamaan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah kedua pemimpin ini dalam menjalankan pemerintahannya telah menerapkan sistem desentralisasi. Masing-Masing daerah atau provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2011 untuk peningkatan hubungan pusat dan daerah (didasarkan pada hasil wawancara bersama bapak Imam Setiyadi). Secara konseptual kedua pemimpin ini melaksanakan perannya sebagai koordinator, hanya saja dalam sisi pencapaian hasil yang diharapkan belum sesuai dengan tujuan awal. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal.

2. Menggunakan Pendekatan Holistik dan Integralistik

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya kedua pemimpin ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada perbaikan pendidikan. Dan terjadi peningkatan atas perkembangan pada bidang pendidikan setiap tahunnya (didasarkan pada gambar 3.1 dan 3.2). Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang

Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa

Islam Cabang Yogyakarta menyatakan :

“Sebenarnya program yang diambil oleh kedua pemimpin ini sama saja, yang menjadi pembeda hanyalah pada formatnya saja. Jika pak SBY dana dialokasikan kepada sekolah secara langsung, sedangkan pak Jokowi dana dialokasikan langsung kepada siswa yang bersangkutan. Dari sisi tujuan sama saja, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian program wajib belajar dua belas tahun yang merupakan penyempurnaan dari program wajib belajar sembilan tahun”.

Akan tetapi yang mendapatkan kritikan disini adalah pada penerapan program kurikulum 2013. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fitria Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia : “Yang harus diperhatikan disini adalah apakah penerapan K13 ini sudah tepat sasaran atau belum. Disatu sisi membawa dampak positif dimana siswa tidak hanya pandai secara *soft skill* namun juga *hard skill*. Dan seharusnya pemerintah memperhatikan penambahan waktu belajar siswa, diakibatkan kelamaan waktu pembelajaran siswa yang akhirnya menjadikan siswa menjadi tidak fokus dalam penerimaan materi pelajaran”.

Imam Setiyadi Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPD Partai Demokrat DIY menyatakan : “Sebenarnya permasalahan yang terjadi tidak hanya K13, tetapi masalah guru honorer juga. Jika dibandingkan dengan zaman pak SBY, guru honorer di zaman pak Jokowi sangat sedikit sekali yang diangkat. Bahkan kita melihat beritanya dimana-mana, dan pak Jokowi juga cenderung pasif ketika ditanya soal itu. Karena pemerintah sekarang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, namun dari segi SDM tidak terlalu diperhatikan kualitasnya”.

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa dari sisi konseptual kedua pemimpin ini telah melakukan pendekatan holistik dan integralistik. Dan memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia baik secara kualitas ataupun kuantitas. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang terjadi dan hasil yang didapatkan juga belum secara maksimal.

3. Memperlakukan Manusia Dengan Cara Yang Manusiawi

Politik luar negeri masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih kepada *All Directions Foreign Policy* (politik luar negeri segala arah) dengan menerapkan paham *A Million Friends Zero Enemy*. Dengan berfokus pada penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Sedangkan Joko Widodo lebih kepada penerapan paham politik luar negeri bebas aktif dan berfokus pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (Saragih, 2018).

Paham yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesamaan pada paham yang diterapkan oleh Recep Tayyip Erdogan, yaitu *Al-Amq Al Istratijii* (strategi politik intensif) dengan sikap keterbukaan serta politik *soft power diplomasi*. Adapun kasus yang ditangani hampir serupa, yaitu kasus yang terjadi di daerah kawasannya. Recep Tayyip Erdogan berfokus pada penyelesaian konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimana daerah ini masuk dalam kawasan daerah Timur Tengah. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono berfokus di Myanmar yang merupakan area kawasan Asia Tenggara. Kesamaan lainnya antara kedua pemimpin ini adalah pada kasus yang ditangani, dimana kasus yang ditangani adalah berfokus pada konflik yang melibatkan umat muslim. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dan Turki merupakan negara yang memiliki penduduk muslim yang banyak (Wicaksono, 2016).

Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan : “Pada zaman pak SBY beliau aktif dalam penyelesaian konflik umat muslim, terbukti beberapa kali Indonesia terlibat dalam penyelesaian

konflik Rohingya di Myanmar. Kalau pak Jokowi kan berbeda, liat kasus yang terjadi saat ini di Uyghur. Beliau tidak ada tanggapan sedikitpun, bahkan hanya diam tidak melakukan apapun. Belum lagi ditambah dengan kasus orasi ketum PB HMI yang dinilai ada unsur politik didalamnya, unsur politik apa yang dimaksud”.

Serupa dengan apa yang dikatakan oleh Fitria Anidya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyatakan : “Ketika berbicara tentang presiden tentunya tidak hanya dalam ranah domestik saja namun juga dalam ranah internasional. Sudah seharusnya Indonesia terlibat dalam upaya penyelesaian konflik dunia tanpa memilih-milih dalam kasus apapun, karena sudah tertulis dalam UUD 1945 bahwa Indonesia ikut serta dalam penyelesaian konflik dan perdamaian dunia”

Berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Recep Tayyip Erdogan memperhatikan konflik yang melibatkan umat muslim, berbeda halnya dengan Joko Widodo. Konflik yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok dengan melibatkan muslim uighur pada masa kepemimpinannya beliau cenderung diam. Beliau beranggapan bahwa tidak boleh mencampuri urusan dari negara lain. Dengan melihat hal ini dapat dikatakan beliau tidak melakukan ciri dari pemimpin demokratis, yang mana ciri dari pemimpin demokratis adalah memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi. Dengan terlibatnya Indonesia dalam organisasi internasional, sudah seharusnya ikut terlibat dalam penyelesaian konflik dan perdamaian dunia. Dengan tidak memilih-milih wilayah ataupun etnis tertentu. Sebagaimana hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan perdamaian dunia.

4. Menindaklanjuti Bawahan Yang Melanggar

Berdasarkan pembahasan diatas kedua pemimpin ini menindaklanjuti para bawahan yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi. Yang menjadi perbedaan adalah Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih untuk menolak revisi UU KPK dan berfokus pada perbaikan kualitas kinerja sedangkan Joko Widodo lebih memilih untuk melakukan revisi UU KPK. Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan dilapangan sebagai berikut:

Berbeda halnya dengan bapak Bambang Praswanto, terdapat dua pandangan yang berbeda, Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan : “Memang betul pak Jokowi membentuk tim 7 untuk menyelesaikan kasus terkait dengan calon Kapolri Budi Gunawan. Akan tetapi beliau cenderung pasif saat itu, karena pembentukan tim itu baru ada setelah adanya desakan dari berbagai masyarakat. Dan sekalipun beliau pada akhirnya menolak untuk melakukan revisi UU KPK dikarenakan tuntutan dari masyarakat, agar lebih berfokus pada peningkatan kinerja”.

Fitria Anindya Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengatakan : “Pemberian remisi itu sangat bertentangan dengan kinerja KPK, jika didasarkan pada HAM tidak cukup kuat menjadi satu alasan remisi itu diberikan. Bahkan jika terus menerus diberikan maka tidak akan menimbulkan efek jera kepada koruptor itu sendiri”.

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa secara konseptual kedua pemimpin ini telah menindaklanjuti bawahan yang terbukti korupsi. Namun pada pelaksanaannya kurang tepat karena hanya berfokus pada melakukan revisi undang-undang seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan seharusnya remisi tidak diberikan, karena jika diberikan maka tidak akan membawa efek jera kepada koruptor dan tentunya hal ini bertentangan dengan tugas dari KPK itu sendiri.

5. Mendengarkan Pendapat, Saran, dan Kritik

Berdasarkan hasil pembahasan diatas perbedaan antara kedua pemimpin ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sedangkan pada zaman Joko Widodo kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dan zaman Joko Widodo penyampaian informasi sering kali disampaikan secara mendadak, berbeda dengan zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Yobi Afis Dimedjo Ketua Bidang Perguruan Tinggi Jaringan dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyatakan : “Zaman pak SBY orang bebas mau mengkritik pemerintah dengan cara apapun. Sampai mereka capek sendiri mengkritik pemerintah, berbeda halnya dengan zaman pak Jokowi beliau kurang suka dikritik terbukti dengan beberapa kali kasus kritikan melalui meme selalu kena UU IT. Jadi bisa dikatakan beliau kurang menerima kritikan. Seharusnya tidak begitu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi dan ciri dari demokrasi sendiri adalah kebebasan berpendapat”.

Imam Setiyadi Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah DPD Partai Demokrat DIY menyatakan : “Setiap kebijakan pasti akan membawa dampak positif dan negatif. Jika pak SBY terlebih dahulu memberikan informasi akan menaikkan harga BBM berbeda halnya dengan pak Jokowi. Beliau selalu memberikan informasi yang mendadak, bahkan beberapa jam sebelum kebijakan ditetapkan. Tentu hal ini banyak menuai kontra dari masyarakat, karena akan terjadi dampak yang signifikan. Jika terlebih dahulu diinformasikan, paling tidak masyarakat sudah dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi”.

Disimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat. Dengan demikian Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan ciri dari pemimpin yang demokratis Sedangkan Joko Widodo kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dengan

demikian disimpulkan bahwa Joko Widodo tidak menjalankan ciri dari pemimpin yang demokratis, dimana ciri dari pemimpin yang demokratis adalah mendengarkan pendapat, saran dan kritikan. Dan salah satu ciri lain dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat.

6. Memberikan Penghargaan Kepada Yang Berprestasi

Sebagaimana ciri dari pemimpin yang demokratis adalah akan selalu memberikan penghargaan kepada para bawahan yang memiliki prestasi. Yang tidak lain tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada para bawahannya yang dianggap telah memiliki peranan penting. Selain itu hal ini dapat menjadi motivasi bagi anggota yang lainnya agar dapat bekerja secara lebih baik lagi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo telah banyak memberikan penghargaan kepada para bawahannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari apresiasi beliau kepada para bawahannya. Penghargaan tersebut dinilai atas dasar kinerja para bawahannya atas pengabdianya kepada masyarakat Indonesia. Karena telah dianggap memiliki kontribusi yang lebih dalam menjalankan tugasnya membantu pemerintahan. Dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua pemimpin ini, dapat dikatakan kedua pemimpin ini telah melakukan ciri dari kepemimpinan yang demokratis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai dalam teori kepemimpinan, bahwa salah satu ciri dari pemimpin

yang demokratis adalah akan selalu memberikan penghargaan kepada para bawahannya yang memiliki prestasi.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis merangkum antara persamaan dan perbedaan kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

No	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1.	Berperan Sebagai Koordinator	Penguatan pada politik desentralisasi dan otonomi daerah	<p>SBY :</p> <p>Gaya kepemimpinan didasarkan pada sikap dan kepribadian diri sendiri</p> <p>Jokowi :</p> <p>Mengadopsi dari kepemimpinan Jawa (Tut Wuri Handayani)</p>
2.	Menggunakan Pendekatan Holistik dan Integralistik	Peningkatan dan perkembangan pada bidang pendidikan disetiap tahunnya (berdasarkan gambar 3.1 dan 3.2)	<p>SBY :</p> <p>a. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Unit Daerah (BUD)</p> <p>b. Penerapan wajib belajar sembilan tahun</p> <p>c. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006</p> <p>d. Pengangkatan guru honorer</p> <p>Jokowi :</p> <p>a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> b. Penerapan wajib belajar dua belas tahun c. Penerapan kurikulum 2013
3.	Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi	<p>Erdogan dan SBY :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan paham <i>soft power diplomasi</i> b. Berfokus pada konflik yang melibatkan umat muslim (Palestina dan Israel) c. Berfokus pada wilayah yang masuk kawasannya (Timur Tengah) 	<p>SBY :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan paham <i>soft power diplomasi</i> b. Berfokus pada konflik yang melibatkan umat muslim (Rohingya dan Rakhine di Myanmar) c. Berfokus pada wilayah yang masuk kawasannya (Asia Tenggara) <p>Jokowi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan paham politik bebas aktif b. Berfokus pada konflik Laut Cina Selatan c. Tidak berfokus pada konflik Uighur di Xinjiang, Tiongkok
4.	Menindaklanjuti bawahan yang melanggar	Penetapan tersangka kepada Menteri yang terbukti melakukan tindakan kasus korupsi	<p>SBY :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK b. Penolakan pemberian remisi kepada tersangka korupsi <p>Jokowi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Awalnya lebih memilih untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK walaupun pada akhirnya menolak b. Memberikan remisi kepada tersangka korupsi atas dasar hak asasi manusia
5.	Mendengarkan pendapat, saran, dan kritikan	Melakukan kebijakan atas kenaikan harga	<p>SBY :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat

		bahan bakar minyak (BBM)	<p>b. Memberikan informasi terlebih dahulu sebelum kebijakan ditetapkan</p> <p>c. Penyampaian kritikan disampaikan dengan aksi demonstrasi</p> <p>d. Banyaknya partai politik yang menolak kebijakan tersebut</p> <p>Jokowi :</p> <p>a. Kurang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat</p> <p>b. Memberikan informasi beberapa jam sebelum kebijakan ditetapkan</p> <p>c. Penyampaian kritikan banyak disampaikan melalui sosial media</p> <p>d. Partai politik cenderung diam terhadap kebijakan tersebut</p>
6.	Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi	Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi	

Diolah Penulis